

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang diperberat oleh bencana kekeringan yang melanda negara kita pada akhir-akhir ini telah banyak menyebabkan orang tua dan keluarga mengalami keterpurukan ekonomi, akibat pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli serta harga bahan pokok yang melambung, sehingga keluarga tidak mampu memenuhi hak dan kebutuhan anak. Akibat lebih jauh yaitu banyaknya anak yang terpaksa harus meninggalkan orang tua, rumah serta meninggalkan sekolah guna mengais nafkah di jalanan. Jumlah anak jalanan di kota-kota besar menunjukkan peningkatan yang sangat tajam.

Sri Ismurdiapti, selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Yogyakarta menyatakan bahwa Anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang sulit untuk di atasi, baik di Yogyakarta maupun di kota-kota lain. Meski segala upaya penyelesaian dan model penanganan seperti rumah singgah, sudah banyak dilaksanakan, namun permasalahan tersebut masih saja sulit diatasi. Di Yogyakarta sendiri, selain sebagai kota tujuan wisata dan pelajar juga sebagai kota tujuan anak jalanan.¹

Jumlah anak jalanan DIY mengalami peningkatan dari 812 orang, kini meningkat menjadi 1.100 anak jalanan. Hal itu terjadi karena kegiatan mengamen dan mengemis menjanjikan penghasilan cukup menggiurkan. Bahkan menurut survei yang pernah dilakukan, hasil mengamen dan mengemis bisa melebihi Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa

¹ Sri Ismurdiapti, *Anak Jalanan dan Permasalahannya, Kedaulatan Rakyat*, 13 Januari 2003.

Yogyakarta. sehingga anak jalanan dan pengemis itupun menjadi malas untuk kembali ke daerah asalnya atau pindah ke profesi lain.²

Anak jalanan didukung pula dari sikap orang tua yang cenderung mendorong anaknya untuk bekerja, sehingga banyak anak yang terpaksa meninggalkan sekolah. Anak lebih baik bekerja sehingga menghasilkan uang daripada harus pergi ke sekolah yang menghabiskan uang dan tidak menjanjikan masa depan kerja yang lebih baik. Karena hal seperti inilah yang memunculkan hubungan eksploratif antara orang tua dan anak yang dapat menyebabkan anak tidak betah di rumah dan cenderung lari ke jalanan yang dirasa bebas. Namun di jalanan, mereka mengalami kekerasan yang leboh dahsyat lagi. Mereka tak jarang terlibat dalam pencurian, perkelahian, tindak kekerasan, jual beli dan penyalahgunaan narkotika serta menukar seks demi uang dan perlindungan.

Anak-anak di masa pertumbuhan dan perkembangan cenderung mengikuti lingkungan. Secara bertahap anak-anak yang memilih ke jalanan akan mengalami perubahan perilaku yang cenderung melecehkan dan melanggar norma. Mereka mulai liar, cuek dan akhirnya membangun norma ala mereka. Hal ini terjadi pada ucapan, perilaku sampai seks bebas.

Terbentuknya komunitas-komunitas anak jalanan yang menciptakan *peer group* dimana ini berfungsi sebagai 'keluarga kedua' yang justru dimanfaatkan oleh anak-anak itu sendiri atau orang lain untuk tujuan kriminalitas dan asusila. Munculnya perluasan konflik, dimana keberadaan anak-anak di jalanan atau tempat-tempat ramai dan menjadi sektor informal

² *Ibid*

pemerasan, tindak kekerasan, tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta perbuatan asusila, sehingga membahayakan perkembangan emosional, intelektual dan moral anak.

Untuk kesediaan dalam melindungi, memberdayakan dan membimbing anak jalanan ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang cukup intensif dari pihak pemerintah melalui Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap mereka karena kegiatan dari program-program yang ditentukan ini tidak akan memaksa mereka jika mereka tidak bersedia.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Bab IV menyatakan tentang maksud dan tujuan dari lembaga swadaya masyarakat adalah sebagai "pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam rangka mengembangkan dan mendayagunakan peranan lembaga swadaya masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah dalam lingkup pembangunan nasional".

Dengan demikian maka jelaslah bahwa keswadayaan berinti pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kualitas hidup peranserta dan kerja sama yang seiring.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Aspek Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pendampingan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pendampingan anak jalanan di Kota Yogyakarta ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan anak jalanan di Kota ?

C. Tinjauan Pustaka

Pembangunan nasional diarahkan dan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Lembaga Swadaya Masyarakat menurut instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dimaksud Lembaga Swadaya Masyarakat dalam instruksi ini adalah Organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang diterapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya.

Dari uraian tersebut mengandung arti bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat ini bersifat sukarela dan bekerja sesuai keinginannya sendiri tanpa

LSM jaringan, yaitu suatu bentuk kerja sama antara LSM dalam bidang kegiatan tertentu, misalnya :

1. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), merupakan wadah kebersamaan LSM yang memusatkan perhatian pada upaya pelestarian lingkungan hidup.
2. Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD), merupakan kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan asas tolong menolong dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan status Kesehatan.
3. Sekretaris Bina Desa (SBD), merupakan forum dari LSM yang bekerja di kawasan pedesaan. SBD membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Kelompok ini dibantu oleh pribadi-pribadi yang terdidik untuk dilatih, membina dan mengembangkan kelompok Swadaya sehingga kelompok yang dibina dapat merasakan manfaatnya.
4. Hak Asasi Manusia di bidang ilmu hukum, dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Peranan LBH dalam penanganan masalah hukum sangat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial, meliputi :
 - a. Kesejahteraan anak
 - b. Kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
 - c. Kesejahteraan orang jompo
6. Lembaga yang menangani Kesejahteraan Umum, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi masalah sosial yang timbul dan mempunyai pengaruh luas dalam kehidupan masyarakat. Mengawasi masalah sosial dalam hal ini meliputi antara lain masalah pelacuran, orang-orang terlantar, penderita

Bahkan pada beberapa anak jalanan, bekerja bukan merupakan hal yang mutlak bagi mereka. Persoalan sebenarnya bukan bekerja atau tidak bekerja, melainkan bagaimana harus tetap hidup. Dengan demikian, anak-anak jalanan seperti ini tidak bisa dimasukkan sebagai anak-anak yang menggelandang.

Masalah pekerja anak berakut pada persoalan-persoalan yang menyangkut faktor-faktor seperti pengusaha, pemerintah, lingkungan pekerjaan, keluarga dan anak itu sendiri. Berbeda dengan pekerja anak, anak jalanan, keluarga, bersekolah dan bermain dengan lingkungan sebaya. Sedangkan di jalanan hidup tanpa keluarga, tidak bersekolah dan selalu bermain dengan sesama anak jalanan. Secara umum ciri-ciri anak jalanan adalah sebagai berikut :

- 1) Berada di tempat umum (jalan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
- 2) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD).
- 3) Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
- 4) Melakukan aktifitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).⁶

Adanya ciri umum tersebut di atas tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena tunggal. Anak jalanan berhadapan dengan dua dimensi masalah yaitu korban dari situasi makro dan masalah keseharian mereka, tak pelak anak jalanan dan pekerja anak merupakan pejuang kehidupan, mereka berani memasuki suatu dunia yang mungkin bagi anak-anak normal tidak dapat melakukannya. Keberanian ini bukan merupakan suatu paksaan, karena tidak semua anak terlantar memilih menjadi anak jalanan atau pekerja anak.

⁶ Nusa Putra, *Potret Buram Anak Jalanan*, Yayasan Nada Dian Nusantara, Jakarta, 1998, hlm. 75

Adanya ciri umum tersebut di atas tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena tunggal. Anak jalanan berhadapan dengan dua dimensi masalah yaitu korban dari situasi makro dan masalah keseharian mereka. Anak jalanan dan pekerja anak merupakan pejuang kehidupan. Mereka berani memasuki suatu dunia yang mungkin bagi anak normal tidak dapat melakukannya. Keberanian ini bukan merupakan suatu paksaan, karena tidak semua anak terlantar memilih menjadi anak jalanan atau pekerja anak.

Kehidupan di jalan yang keras dengan aturan-aturan yang bebas dan keras pula, yang memaksa anak jalanan mengikuti cara hidup di jalanan yang penuh dengan kekerasan, sehingga membentuk karakter yang dibentuk oleh aturan-aturan jalanan seperti sifat brutal, mudah emosi, liar, semaunya sendiri, kejam, dan banyak sifat-sifat lagi yang mencerminkan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan ini dibedakan kedalam dua kelompok menurut kehidupannya dan kontak keluarga. Semakin merebaknya perkembangan masalah anak jalanan telah mendorong pemerintah dan masyarakat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat berupaya mengatasinya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aspek hukum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pendampingan anak jalanan di Kota Yogyakarta
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pendampingan anak jalanan di Kota Yogyakarta

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk memberikan sumbangan kepada Ilmu Pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Bagi Pembangunan

Memberikan masukan bagi Pembangunan khususnya di Kota Yogyakarta

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian Lapangan, yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian, dengan tujuan untuk mencari data-data primer yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
- b. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan metode penelitian.
- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke tempat atau instansi yang berhubungan dengan obyek penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta dengan alasan di Kota Yogyakarta terdapat LSM yang jumlahnya cukup banyak khususnya LSM yang bergerak melakukan pendampingan terhadap anak jalanan.

Dengan responden Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu :

- a. Rumah Singgah Anak Mandiri
- b. Rumah Singgah Ceria
- c. Rumah Singgah Ahmad Dahlan

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis, logis, yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pendampingan anak jalanan di Kota Yogyakarta

5. Analisis Data.

Gambaran umum yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.